

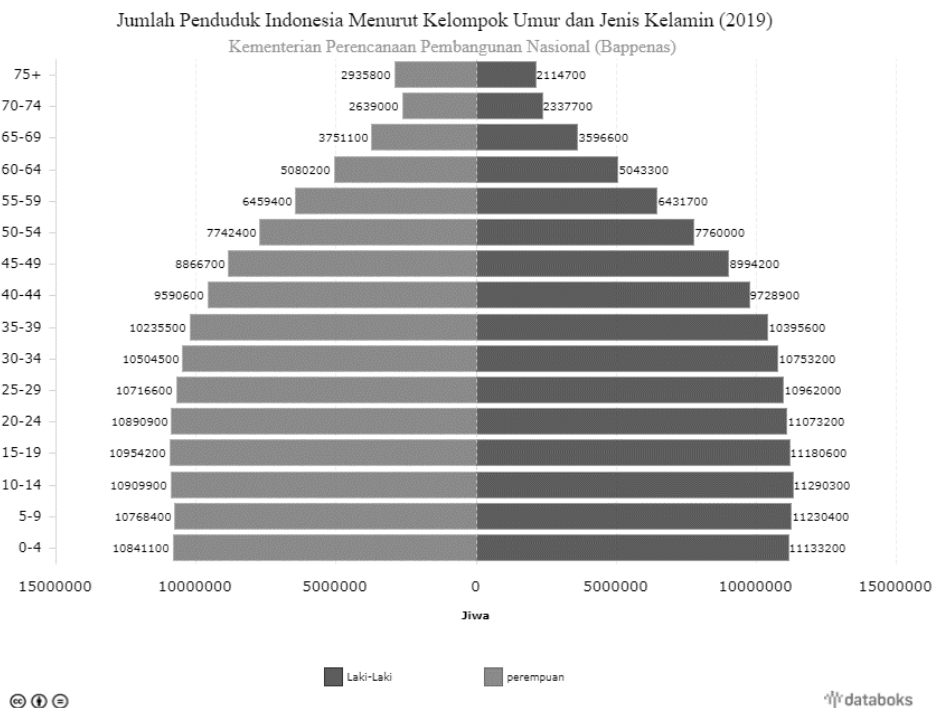
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan sekelompok orang atau manusia yang tinggal atau menetap dalam sebuah wilayah atau negara. Jumlah penduduk suatu negara selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada suatu negara tersebut. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 telah diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa pada tahun 2020.

GAMBAR 1.1



Jumlah penduduk yang begitu besar di Negara Indonesia menjadi permasalahan yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi

oleh suatu daerah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan, menyebabkan bertambahnya permasalahan kota dan meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan kegiatan perekonomian yang meningkatkan serta laju kebutuhan sumber daya yang harus dieksploitasi juga meningkat. Kepadatan jumlah penduduk ini menyebabkan persoalan atau tantangan tersendiri serta permasalahan kompleks yang dihadapi oleh daerah perkotaan. Salah satu persoalan daerah perkotaan yang cukup mendesak adalah masalah sampah kota yang volumenya semakin meningkat setiap tahunnya dan hal ini berbanding lurus dengan pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk di daerah kota tersebut.

Penyataan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang diadakan Juli tahun 2019 bersama beberapa kepala daerah di Indonesia dengan pembahasan perkembangan pembangunan tenaga listrik oleh sampah, menyampaikan jika Indonesia menempati urutan ke-2 di dunia untuk permasalahan sampah. Hal ini cukup menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan di Indonesia. Sampah merupakan masalah klasik dan umum yang dihadapi oleh banyak negara maju maupun berkembang dan hingga saat ini penanganan serta pengelolaan sampah masih terus dikembangkan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang serta memiliki permasalahan sampah cukup menjadi masalah yang harus mendapat perhatian lebih sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pula.

Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang juga merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah

Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Medan, dan Kota Bandung sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan pada saat siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Hal tersebut juga didukung dengan luas wilayah Kota Semarang yang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, disamping itu Kota Semarang juga merupakan kota administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa. Kota Semarang menduduki peringkat 1 (satu) pada tahun 2017 untuk kategori kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah informasi tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang dengan wilayah yang luas disertai dengan jumlah penduduk yang cukup besar akan memunculkan berbagai permasalahan di Kota Semarang, salah satunya adalah permasalahan mengenai persampahan di Kota Semarang yang masih ditemui masalah tingginya volume sampah dan bau menyengat dari timbunan sampah tersebut. Hal ini merupakan dampak negatif dari pesatnya pembangunan suatu kota serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Muthohar mengatakan jika produksi sampah di Kota Semarang saat ini mencapai angka 1.200ton setiap harinya. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah makin bertambah pula. Peningkatan jumlah sampah tersebut tidak sebanding dengan sistem pengolahan sampah yang baik. Permasalahan sampah ini terjadi di sebagian besar kota terutama kota-kota besar yang jumlah penduduknya juga besar.

Berbagai permasalahan baru dapat timbul oleh dampak negatif sampah di Kota Semarang mengharuskan pemerintah Kota Semarang untuk segera

melaksanakan penanganan sampah dengan sigap. Salah satu dampak negatif dari tidak terkelolanya sampah dengan baik yaitu pencemaran lingkungan hidup. Adanya berbagai jenis sampah yang terlihat menumpuk di sudut jalan di Kota Semarang. Kawasan Kota Semarang dengan rob air laut menimbulkan genangan-genangan air di beberapa titik. Hal ini diperparah oleh sampah yang menumpuk tersebut juga ikut tergenang sehingga menimbulkan genangan air tersebut terlihat keruh dan kotor. Masalah baru yang timbul dari pencemaran sampah, dimana lingkungan hidup yang tercemar tadi dapat mengganggu aspek kesehatan masyarakat sekitar. Adanya banyak penyakit yang timbul oleh akibat pencemaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penimunan sampah ini tidak hanya tertuju pada lingkungan hidup dan kesehatan, tetapi mempengaruhi nilai estetika dari suatu kota.

Sampah yang diperkirakan sebanyak 65 juta ton dihasilkan pada setiap tahunnya, dimana 15% diantaranya merupakan sampah plastik. Bank sampah merupakan satu-satunya gerakan yang ada di Negara Indonesia ini yang dinilai cukup efektif untuk mengurangi jumlah penumpukan sampah dan juga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat sekitar. Walikota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa salah satu beban lingkungan di Kota Semarang adalah sampah yang banyak karena penduduk Kota Semarang yang juga semakin bertambah. Pemerintah Kota Semarang juga telah memberikan edukasi/pelajaran kepada masyarakat untuk mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna melalui kegiatan bank sampah. Terdapat 1000–1300 ton kubik sampah perhari, dan 400 ton telah dikerjasamakan dengan perusahaan swasta menjadi kompos untuk

dijual ke petrokimia, dan sisanya akan diolah menjadi listrik tenaga sampah dengan bantuan KPBU, SNI, Menteri Keuangan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah kota merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Peningkatan jumlah sampah Kota Semarang rata-rata 1,5 % / tahun. Proyeksi jumlah sampah Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar: \pm 1.600 ton/hari. Pemerintah Kota Semarang tidak dapat secara mandiri mengatasi permasalahan sampah karena masalah sampah di Kota Semarang merupakan masalah yang cukup genting dimana produksi sampah setiap tahunnya yang selalu meningkat ditambah dengan kapasitas TPA Jatibarang yang semakin mengecil.

TABEL 1.1

Timbulan Sampah Kota Semarang 2022-2023

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	1.181,06	431.085,22
2023	1.182,29	431.534,65

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian

Lingkungan Hidup 2024 (sipsn.menlhk.go.id)

Dari data timbulan sampah Kota Semarang di atas, terjadi peningkatan timbulan sampah dari tahun 2022 ke tahun 2023 baik timbulan sampah harian maupun tahunan. Timbulan sampah harian Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 1.181,06 ton naik hingga 1.182,29 ton pada tahun 2023. Timbulan sampah tahunan Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 431.085,22 ton naik hingga 431.534,65 ton pada tahun 2023. Peningkatan timbulan sampah di Kota Semarang akan

berpengaruh pada menyempitnya lahan TPA Jatibarang serta harus ada proses menggunakan teknologi ramah lingkungan yang mengurangi sampah secara signifikan agar sampah tidak terus menumpuk di TPA.

Sampah adalah suatu benda/barang yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan. Berdasarkan sifat kimianya, sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam.
2. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri.

Pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) yang telah diterapkan dari tahun 1992. Usaha ini ternyata belum mampu mengatasi permasalahan volume sampah di Kota Semarang serta volume sampah di TPA Jatibarang yang semakin bertambah. Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menangani permasalahan sampah dengan cara mengambil sampah masyarakat, menampung di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan membuang sampah tersebut ke TPA Jatibarang.

Dalam rangka mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di wilayah kecamatan di Kota Semarang. Pengelolaan sampah terpadu ini selain dapat mengurangi volume sampah yang selanjutnya diangkut ke TPA Jatibarang, juga dapat meningkatkan nilai kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan serta menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pelaksana teknis pengelolaan sampah terpadu adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga anggota-anggota dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dengan menggunakan berbagai sarana pendukung yang dimiliki oleh para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pengentasan permasalahan sampah, dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bertugas sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah terpadu.

Permasalahan sampah yang terdapat di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang telah ditangani dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa bank sampah yang berada pada satu koordinasi yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Mukti Jaya. Kota Semarang memiliki contoh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang telah menjalankan tugas pengelolaan sampah dengan cukup baik. Salah satu TPST di Kota Semarang yang dikelola oleh KSM Tri Asih (TPST 3R) dan KSM Mukti Asih (composting)

di RW 04 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang. Pada Kelurahan Muktiharjo Kidul pengelolaan kegiatan bank sampah sudah berjalan baik terutama pada pengelolaan sampah organik. Selain itu, warga juga dapat menikmati hasil penjualan dari kegiatan *composting* sampah organik. Kemajuan dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah organik di Kelurahan Mukti Harjo ini juga didukung dengan banyaknya tumbuhan eceng gondok di wilayah tersebut yang menjadi bahan baku utama pembuatan pupuk kompos, selain bahan baku yang berasal dari limbah masyarakat. Tidak hanya pengelolaan sampah organik yang berjalan dengan baik di Kelurahan Muktiharjo Kidul, tetapi pengelolaan sampah anorganik juga berjalan dengan baik. Kegiatan pengelolaan sampah anorganik dilakukan dengan cara memilah sampah-sampah anorganik yang kemudian akan dijual secara kiloan ke pengepul barang bekas.

Dalam hal produktivitas dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti belum ada pengelolaan keberlanjutan seperti konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse) dan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Metode kerja dalam pengelolaan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti yang masih menerapkan sistem angkut-buang sampah dimana sistem ini sampah-sampah masyarakat hanya diangkut dan dibuang di TPS terdekat. Penerapan sistem angkut-buang sampah ini sama saja tidak mengurangi penimbunan sampah justru menambah timbunan sampah di TPS yang nantinya akan tetap menambah volume sampah di TPA Jatibarang. Disamping itu, terdapat fasilitas pengelolaan sampah yang belum termanfaatkan dengan baik yakni gedung kompos. Peran dan fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam petunjuk

teknis pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum salah satunya adalah untuk mendorong ekonomi masyarakat yang nyatanya kegiatan dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti ini belum mencapai pada fungsi tersebut.

Pengelolaan sampah yang berjalan di Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat menjadi contoh bagaimana KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) terutama yang bergerak dibidang pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik. Sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya diangkut dan dibuang tetapi juga pengelolaan sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos serta sampah anorganik yang dikelolah untuk dipilah dan dijual sebagai pendapatan tambahan anggotanya. Berkaca pada pengelolaan sampah yang diterapkan di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Karya Bakti yang berada di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang juga memiliki lingkup kerja yang sama yakni dalam pengelolaan sampah. Apabila pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KSM Karya Bakti yang berada di Kelurahan Bulu Lor dibandingkan dengan KSM Tri Asih dan KSM Mukti Asih yang berada di Kelurahan Muktiharjo Kidul sangat berbeda dan pengelolaan pada KSM Karya Bakti belum sebaik yang dilakukan pada KSM di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Perbedaan pengelolaan sampah tersebut ada pada bagaimana sampah yang dikumpulkan dapat diolah kembali dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan bersama serta tidak hanya diangkut dan dibuang. KSM Tri Asih dan KSM Mukti Asih yang berada di Kelurahan Muktiharjo Kidul telah menjalankan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan baik, hal ini menunjukkan

bahwa adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah di KSM Karya Bakti karena pada KSM Karya Bakti hanya menerapkan sistem angkut-kumpul-buang dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor yang seharusnya dapat dilakukan pengelolaan keberlanjutan agar sampah yang dikumpulkan dapat memiliki manfaat yang lebih bagi anggotanya serta dapat meningkatkan kinerja KSM Karya Bakti menjadi lebih baik.

GAMBAR 1.2



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Dokumentasi tersebut menggambarkan bahwa di Kelurahan Bulu Lor memiliki fasilitas untuk pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos dan bank sampah, tetapi fasilitas tersebut saat ini sudah tidak beroperasi dan menjadi terbengkalai. Fasilitas pengelolaan kompos tersebut menjadi kurang termanfaatkan dengan baik.

GAMBAR 1.3



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Dokumentasi diatas (Gambar 1.3) merupakan gambaran kondisi TPS di Kelurahan Bulu Lor, Kota Semarang. Sistem pengelolaan yang dilakukan di Kelurahan Bulu Lor masih menggunakan sistem angkut-buang serta belum ada keberlanjutan pengelolaan sampah.

GAMBAR 1.4



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Ketidakefektifan dari kegiatan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti ini diperoleh dari *website* resmi Kelurahan Bulu Lor melalui *bululor.semarangkota.go.id* yang didukung dengan pernyataan salah satu anggota dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti yaitu Bapak Tohir sebagai Sekretaris KSM Karya Bakti. Penelitian ini memberikan motivasi kepada penulis untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan terkait bagaimana kinerja KSM Karya Bakti dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Bulu Lor, Semarang. Keluaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah ditemukan solusi dalam mengatasi sampah di Kota Semarang melalui bahasan administrasi publik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada penggumpul data, seperti berita, jurnal, atau penelitian terdahulu.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

- 1.2.1 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti masih menerapkan sistem angkut-kumpul-buang pada penanganan sampah di Kelurahan Bulu Lor
- 1.2.2 Tidak adanya pengelolaan sampah keberlanjutan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti.
- 1.2.3 Pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah (rumah kompos) yang kurang optimal oleh KSM Karya Bakti.

1.3 RUMUSAN MASALAH

- 1.3.1 Bagaimana kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang?
- 1.3.2 Bagaimana faktor yang mendorong dan menghambat kinerja organisasi dalam proses pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti?

1.4 TUJUAN

- 1.4.1 Menganalisis kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang.

- 1.4.2 Mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat kinerja organisasi dalam proses pengelolaan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti di Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang.

1.5 KEGUNAAN

1.5.1 KEGUNAAN TEORITIS

1.5.1.1 Membantu pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik teori mengenai manajemen publik terutama dalam proses pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang.

1.5.1.2 Membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian sebagai penyusunan penelitian.

1.5.2 KEGUNAAN PRAKTIS

1.5.2.1 KEGUNAAN BAGI PENELITI

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan/aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

1.5.2.2 KEGUNAAN BAGI INSTANSI TERKAIT

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1.5.2.3 KEGUNAAN BAGI MASYARAKAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana proses pengelolaan sampah yang baik di Kota Semarang.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.6.1 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1.2 Tabel Penelitian Terdahulu

Jurnal (1)	Artikel & Pengarang (2)	Tujuan (3)	Temuan (4)	Perbedaan Penelitian (5)
<i>Comparative life cycle assessment of system solution scenarios for residual municipal solid waste management in NSW, Australia</i>	Behnam Dastjerdi, Vladimir Strezov, Ravinder Kumar, JingHe, Masud Behnia. <ul style="list-style-type: none"> • Department of Earth and Environmental Sciences, Faculty of Science & Engineering, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia • Macquarie Graduate School of Management, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia 2020	Menganalisis pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di New South Wales (NSW).	Pengelolaan sampah yang dilakukan di New South Wales (NSW) dilakukan untuk dapat juga memproduksi energi listrik serta untuk mengembangkan pengelolaan sampah berkelanjutan.	Penelitian yang dilakukan oleh Behnam Dastjerdi dkk berfokus pada analisis pengelolaan sampah untuk memproduksi energi baru berupa listrik sebagai bentuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kinerja KSM yang menangani sampah, lokus dari kedua penelitian berbeda dimana penelitian milik Behnam Dastjerdi dkk dilakukan di New South Wales dan penelitian penulis dilakukan di Kota Semarang.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Challenges and Practices on Waste Management and Disposal during COVID-19 Pandemic</i>	<p>Dwi Hantoko, Xiaodong Li, AgamuthuPariatamy, Kunio Yoshikawa, Mika Horttanainen, Mi Yan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zhejiang University of Technology • Institut Teknologi Bandung • Lappeenranta University of Technology <p>2020</p>	Menganalisis tantangan peningkatan sampah pembuangan selama COVID-19.	Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap praktik pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak tepat selama 16andemic berpotensi risiko bagi personel pengelolaan limbah dan peningkatan penularan virus.	Penelitian oleh Dwi Hantoko dkk berfokus pada analisis tantangan permasalahan sampah selama masa pandemic Covid-19. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada bagaimana suatu kelompok masyarakat yang terbentuk untuk menangani permasalahan sampah di lingkungan masyarakat.
<i>Assessing a Hierarchical Sustainable Solid Waste Management Structure with Qualitative Information: Policy and Regulations Drive Social Impacts and Stakeholder Participation</i>	<p>Feng-Ming Tsai, Ming-Lang Tseng, Ming K. Lim, Kou-Jui Wu, Abu Hashan Md Mashud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • National Taiwan Ocean University • Medical University, Taiwan • Coventry University, UK • National Taiwan University of Technology <p>2020</p>	Mendeskripsikan pengaruh sosial, kebijakan, dan stakeholder dalam pengelolaan limbah padat berkelanjutan di Vietnam.	3 aspek dampak sosial, kebijakan dan regulasi serta partisipasi pemangku kepentingan merupakan aspek utama mempengaruhi pengelolaan limbah berkelanjutan karena perannya saling terkait untuk membantu keputusan meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan sampah.	Penelitian oleh Feng-Ming Tsai dkk berfokus pada bagaimana pengaruh faktir eksternal dalam pengelolaan sampah padat di Vietnam. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada analisis kinerja KSM dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Implementation Analysis of Solid Waste Management in Ludhiana city of Punjab</i>	Ishfaq Showket Mir, Puneet Pal Singh Cheema, Sukhwinder Pal Singh. Guru Nanak Dev Engineering College, India, 2021	Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan di kota.	Beberapa masalah timbul dari administrasi yang memengaruhi implementasi pada tahap awal seperti sumber daya yang tidak memadai, lahan yang tidak memadai untuk pembuangan akhir limbah, kurangnya rencana pengelolaan limbah padat yang terintegrasi, ketidaksadaran publik, kekurangan staf, tidak adanya penggabungan teknologi modern dan penegakan hukum yang buruk, hukum dan peraturan.	Penelitian oleh Ishfaq Showket Mir dkk berfokus pada apa yang menyebabkan implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan yang terhambat. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana suatu KSM dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
<i>Knowledge and Practice in Household Waste Management</i>	Agnes Widiyanto, Suratman, Nisrina A, T. Murniati, Oktafiani Pratiwi. <ul style="list-style-type: none"> • Jend. Soedirman University, Purwokerto • University of Arkansas, Fayetteville, United States 2019	Mendeskripsikan dampak pencemaran sampah yang ditimbulkan dari sampah rumah tangga untuk mengatasi permasalahan sampah.	Pengelolaan sampah tergantung pada pengetahuan pengelolaan sampah yang dimiliki serta intervensi juga efektif dalam mempengaruhi pengetahuan dan praktik dalam	Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Fitria dkk berfokus pada bagaimana dampak pencemaran sampah rumah tangga serta pengelolaan permasalahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur	Muhammad Nizar, Erman Munir, Edi Munawar, Irwan. Universitas Sumatera Utara, 2017	Mendeskripsikan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.	Manajemen pengelolaan sampah di Indonesia masih menekankan pada pembuangan di TPA, kapasitas TPA yang semakin terbatas. Zero Waste merupakan konsep yang bermula dari, mencegah timbulnya sampah di “hulu” ke “hilir”, bukan hanya menangani sampah di “end pipe”.	sampah rumah tangga. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana kinerja KSM yang memiliki tugas dalam pengelolaan sampah masyarakat. Penelitian ini memiliki lingkup yang sama mengenai pengelolaan sampah, namun penelitian milik M. Nizar dkk lebih mendeskripsikan mengenai konsep <i>Zero Waste</i> dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kinerja dari KSM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang	Sadiro, Arief Setyawan, Lukman Nulhakim. Institut Nasional Malang, 2018	Menganalisis pola pengelolaan sampah yang dilakukan di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang	Pola pengelolaan sampah sebagian besar masih menggunakan pola Kumpul-Angkut-Buang. Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah tersedia namun belum memadai jika dikaitkan dengan paradigma pengelolaan sampah yang lama. Keterlibatan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis 3R cukup signifikan.	Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian mengenai pengelolaan sampah di masyarakat, namun penelitian milik Sudiro dkk lebih menyoroti model pengelolaan sampah yang masih menggunakan pola kumpul-angkut-buang serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah berbasis 3R. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kinerja salah satu kelompok masyarakat yang bekerja dibidang pengelolaan sampah.
Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh	Muchammad Zamzami Elamin, dkk. Universitas Airlangga, 2018	Mendeskripsikan pengelolaan sampah di Desa Disanah Kabupaten Sampang	Pengelolaan sampah di Desa tersebut masih kurang baik hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk	Penelitian ini memiliki kesamaan lingkup mengenai pengelolaan

<p>(1) Kabupaten Sampang</p>	<p>(2)</p>	<p>(3)</p>	<p>(4) pembangunan tempat penampungan sementara, fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar.</p>	<p>(5) sampah, namun penelitian milik Muchammad Zamzami dkk lebih mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sampah di Desa Disanah yang sebatas pembuangan dan pembakaran. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih menyoroti tentang bagaimana suatu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bidang pengelolaan sampah untuk menangani permasalahan sampah di lingkungan masyarakat.</p>
--------------------------------------	------------	------------	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Analisis Pengelolaan Sampah dan <i>Willingness To Pay</i> (WTP) Masyarakat di Desa Purwasari</p>	<p>Mochammad Faroz Daq, Prayoga Suyadharma. Institut Pertanian Bogor, 2020</p>	<p>Mengetahui sistem pengelolaan sampah dan <i>Willingness to Pay</i> (WTP) masyarakat terhadap upaya Pengelolaan sampah di Desa Purwasari.</p>	<p>Pengelolaan sampah di Desa Purasari masih kurang baik dikarenakan tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara maupun tempat pembuangan akhir serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan lingkup mengenai pengelolaan sampah, namun penelitian milik M. Faroz Daq dkk lebih pada menganalisis upaya pengelolaan sampah berdasarkan <i>willingness to pay</i> atau kesediaan membayar sejumlah uang untuk pengurangan dampak negative dari penurunan kualitas lingkungan. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada baik-buruk kinerja dari KSM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta	Rohani Budi Prihatin. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020	Menganalisis permasalahan sampah di masa depan seiring dengan perkembangan kota terkait.	Pengelolaan sampah di Kota Cirebon dan Kota Surakarta masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Artinya, pengelolaan sampah di kedua kota tersebut dilakukan dengan dikumpulkan sebanyak banyaknya, kemudian diangkut secepat cepatnya, dan setelah itu dibuang sejauh-jauhnya. Pola tersebut menyebabkan sampah di kedua kota akan timbul lebih cepat ketimbang solusi pengelolaan sampah.	Penelitian yang dilakukan oleh Rohani Budi Prihatin lebih menyoroti tentang bagaimana pengelolaan sampah kota akibat meningkatnya permasalahan sampah kota yang sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk kota. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada kinerja kelompok masyarakat yang menangani permasalahan sampah di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan pada tabel

1.3, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan dengan uraian latar belakang masalah yang ada. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Muhammad

Nizar dkk dengan judul “Manajemen Pengelolaan sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur” dimana penelitian tersebut berfokus pada kinerja organisasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Penelitian milik Sadiro dkk dengan judul “Model Pengelolaan Sampah Pemukiman di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang” dimana penelitian tersebut menyoroti model pengelolaan sampah yang masih menggunakan pola kumpul-angkut-buang serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah berbasis 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Kedua penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berfokus pada organisasi yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum menerapkan pengelolaan sampah yang lebih baik seperti konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dan pola kerja yang masih menggunakan kumpul-angkut-buang. Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokus penelitian dan subjek penelitian. Kinerja dalam organisasi memiliki peran penting dalam keberhasilan kegiatan organisasi tersebut. Penelitian terdahulu ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menentukan teori-teori dalam penelitian serta pedoman penulis dalam melakukan penelitian. Teori-teori dalam penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai argument pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan.

Dari latar belakang masalah yang ditemukan, kinerja organisasi menjadi penting karena terkait dengan keberhasilan atau pencapaian dari kegiatan organisasi tersebut, sehingga mendorong penulis untuk mengangkan

judul penelitian yaitu “**Analisis Kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bidang Pengelolaan Sampah “KSM Karya Bakti” di Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang**”

1.6.2 ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi Publik sendiri dalam pembahasannya lebih menekankan kepada kepentingan publik. Definisi administrasi negara/publik menurut Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2014:3) mengartikan sebagai suatu proses organisasi dan koordinasi dalam mengelola sumber daya dan personil publik untuk dilakukan suatu formulasi, implementasi, serta pengelolaan keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Ilmu administrasi publik (dalam Muhammad, 2019: 13) yakni ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan kajian pada fungsi internal dan eksternal terhadap struktur dan proses yang penting dari suatu sistem dan aparatur pemerintahan.

Menurut Yeremias T. Keban (2014:5) mengemukakan bahwa administrasi publik diartikan sebagai suatu proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan oleh suatu birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Ali Mufiz, 2015: 12) menyatakan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari hal yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan bagaimana cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya

mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melaksanakannya.

Menurut Waldo (dalam Sahya Anggara, 2016:134) mendefinisikan administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia atau orang dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi publik sebagai seni dan ilmu tentang manajemen yang diperlukan untuk mengatur urusan negara.

Menurut Nigro & Nigro (dalam Harbani Pasolong, 2010:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup tiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Setiap cabang memiliki peran masing-masing dalam kebijakan publik yang merupakan bagian dari proses politik. Peran tersebut berbeda dengan adanya administrasi swasta, namun dalam pemberian pelayanan publik tetaplah berkaitan dengan kelompok-kelompok swasta dan individu. Penekanan pada definisi ini adalah proses institusional tentang bagaimana upaya kerjasama tersebut sebagai kegiatan publik.

Nicholas Henry (dalam Harbani Pasolong, 2010:8) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan suatu perpaduan yang kompleks antara teori dan praktek yang masuk dalam proses-proses manajemen dengan nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari sejumlah definisi administrasi publik diatas dapat dirangkum sebagai berikut, administrasi publik adalah usaha kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien dimana lingkup administrasi publik memiliki lokus yaitu permasalahan dan kepentingan publik serta fokusnya pada pengembangan administrasi publik dalam memenuhi kebutuhan publik.

Perkembangan ilmu administrasi publik telah melalui beberapa pergantian sudut pandang yang lama dengan yang baru. Terdapat lima (5) paradigma administrasi negara/publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry sebagai berikut (dalam Harbani Pasolong, 2010:28-32)

1. Dikotomi politik dan administrasi (1900-1926). Pemerintah memiliki dua fungsi pokok yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Tokoh dalam paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Pemisahan antara urusan politik dan administrasi merepresentasikan pemisahan antara badan legislatif dengan tugas mengekspresikan aspirasi rakyat dan badan eksekutif dengan tugas melaksanakan atau mewujudkan aspirasi tersebut. Implikasi dari paradigma ini adalah suatu administrasi harus dilihat sebagai bebas nilai, serta diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari suatu *government bureaucracy*. Kelemahan dari paradigma ini ialah penekanannya pada lokus saja yaitu birokrasi pemerintahan tanpa melihat fokus yang belum jelas keberadaannya dalam administrasi publik.
2. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937). Fokus paradigma ini lebih penting daripada lokusnya. Tokoh yang terkenal dari paradigma ini

adalah Willoghby, Gullick & Urwick, serta tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Para tokoh tersebut memperkenalkan prinsip-prinsip dalam administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) dimana prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dimanapun atau penggunaannya yang universal. Kelemahan paradigma ini ialah keberadaan lokus yang belum jelas karena beranggapan jika prinsip tersebut dapat dilakukan dimana saja termasuk juga organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, paradigma ini hanya menekankan pada fokus daripada lokusnya.

3. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970). Paradigma ini merupakan upaya penetapan kembali hubungan antara administrasi publik dengan ilmu politik. Topik pada paradigma ini adalah pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin serta adanya penilaian dari prinsip-prinsip administrasi yang tidak dapat berlaku secara universal. Hal tersebut menandakan bahwa administrasi publik bukannya bebas nilai atau dapat berlaku dimana saja tetapi justru administrasi publik selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Penerapannya dalam administrasi publik, politik dan administrasi nyata berlaku sehingga memunculkan teori bahwa administrasi publik juga merupakan teori politik. Munculnya pernyataan tersebut menumbuhkan paradigma baru yaitu administrasi

publik sebagai ilmu politik serta lokusnya adalah pada birokrasi pemerintahan. Fokus dalam paradigma ini menjadi tidak jelas karena adanya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi. Pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena adanya ilmu politik yang dianggap lebih dominan dalam penerapan administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai ilmu administrasi (1954-1970). Paradigma ini merupakan kritik terhadap paradigma sebelumnya. Paradigma ini memunculkan kembali prinsip-prinsip manajemen yang pernah dibahas dalam paradigma lama tetapi lebih dikembangkan secara mendalam dan secara ilmiah. Fokus dari paradigma ini adalah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, aplikasi teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan lain sebagainya. Terdapat dua arah perkembangan dalam paradigma ini yakni yang orientasi pada ilmu murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan orientasi pada kebijakan publik. Fokus dalam paradigma ini dianggap dapat diterapkan juga dalam dunia bisnis dan tidak hanya dalam dunia administrasi publik yang menjadikan lokus dari paradigma ini menjadi kurang jelas.
5. Administrasi Publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang). Paradigma yang terakhir ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam paradigma ini adalah pada teori organisasi, teori

manajemen, dan teori kebijakan publik. Lokus dalam paradigma ini adalah adanya masalah–masalah publik dan kepentingan publik.

1.6.3 MANAJEMEN PUBLIK

Manajemen mencakup kegiatan dalam mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu dengan upaya terbaik melalui tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang kegiatan yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka. Berikut adalah definisi manajemen menurut para ahli:

Menurut Donovan dan Jackson (dalam Harbani Pasolong, 2010:82), manajemen merupakan proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu sebagai serangkaian keterampilan dan tugas.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Yeremias T. Kaban, 2014:92), Manajemen Publik merupakan suatu proses pertanggungjawaban seseorang dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nashuddin (2016: 1), menyatakan bahwa manajemen publik juga bagian dari administrasi publik yang memfokuskan pada fungsi dan proses pengaturan organisasi publik.

Menurut Kristiadi (dalam Waluyo, 2007: 119), Manajemen Publik merupakan suatu upaya dalam berbagai aktivitas pemerintah yang mencakup segala aspek kehidupan warga negara atau masyarakat.

Menurut Waluyo (2007: 119), Manajemen Publik adalah suatu proses atau usaha pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan negara melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Menurut Overman (dalam Harbani Pasolong, 2010:83), Manajemen Publik bukanlah suatu ilmu manajemen, walaupun dalam pelaksanaannya berkaitan dengan hal tersebut. Manajemen publik bukan suatu analisis kebijakan ataupun “administrasi publik baru”. Akan tetapi, manajemen publik menekankan pada penggunaan instrumen yang ada pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu pengelolaan dari aspek umum organisasi serta penggabungan antara fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Menurut Yeremias T. Keban (2014), Manajemen Publik merupakan suatu proses menggerakkan sumber daya manusia dan non-manusia sebagai bagian dari kebijakan publik dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen publik merupakan upaya pemerintah untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam rangka mencapai tujuan.

1.6.4 ORGANISASI PUBLIK

Menurut Sahya Anggara (2016: 55) mengemukakan organisasi sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara

sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robbins (dalam Yeremias T. Keban, 2014:127) mendefinisikan organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar serta memiliki batasan yang jelas yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Yeremias T. Keban, 2014:127) mendefinisikan organisasi merupakan sekumpulan orang atau manusia dalam suatu kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Zarrin Hubaisy (2014: 1) Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani masyarakat.

Menurut DR. Drs. Masana Sembiring (2012: 16) Organisasi sektor publik pada umumnya lebih berorientasi pada pelayanan pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah suatu wadah yang dibentuk dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai perwujudan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1.6.5 KINERJA

Menurut Murphy (dalam Sudarmanto, 2018: 8) mendefinisikan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang selaras dengan tujuan organisasi atau suatu organisasi tempat individu tersebut bekerja.

Menurut Yeremias T. Keban (2014:210) menyatakan bahwa kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kinerja kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja kelompok menggambarkan seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sesuai yang ditetapkan oleh institusi. Kinerja program atau kebijakan berkaitan dengan seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan tersebut telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang cukup erat. Pernyataan lain apabila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (*corporate performance*) juga baik. Kinerja institusi berkaitan dengan seberapa jauh suatu institusi tersebut telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi.

Menurut Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil (2010) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu proses mengenai bagaimana suatu pekerjaan

berlangsung dalam mencapai hasil kerja. Kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia.

Menurut Yeremias T. Keban (2014:210) bahwa kinerja menekankan pada pelaksanaan dalam pekerjaan maka telah ditetapkan pada aspek kinerja yang harus dinilai seperti kesetiaan, prestasi, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Menurut Armstrong dan Baron (dalam Prof. Dr. Wibowo, 2010: 7) bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada perekonomian.

Menurut Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto, 2018: 7) mendefinisikan bahwa kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan tugas organisasi, perencanaan organisasi, dan manajemen organisasi.

Menurut Chaizi Nasucha (dalam Irham Fahmi, 2011: 3) mengemukakan bahwa kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi yang secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok dengan usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.

Menurut Swanson (dalam Yeremias T. Keban, 2014:211) mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan gambaran proses

pencapaian misi dan tujuan serta sebagai suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mencapai kuantitas, kualitas dan tepat waktu dimana membutuhkan juga faktor manusia untuk pengembangan keahlian sesuai dengan tuntutan yang ada.

Berdasarkan definisi kinerja organisasi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya organisasi.

Menurut Mahmudi (2013: 92), dimensi dalam mengukur kinerja organisasi, aktivitas atau program adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pelayanan

Penilaian kinerja perlu mencakup indikator biaya yang cukup penting dalam efisiensi organisasi. Indikator biaya ini untuk melihat seberapa layak biaya pelayanan yang ditentukan dengan tingkat pelayanan yang diberikan.

2. Tingkat Pemanfaatan

Tingkat pelayanan ini diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kapasitas atau sumber daya yang menganggur atau tidak diperlukan dalam organisasi. Sumber daya yang dimiliki apabila tidak digunakan secara maksimal dalam pemanfaatannya menjadikan suatu kinerja menjadi tidak efisien dan efektif.

3. Kualitas dan Standar Pelayanan

Kualitas dan standar pelayanan diperlukan karena mencakup penilaian mengenai ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, kenyamanan, kecepatan

respon, keamanan, kebersihan, keramahan, etika, estetika, dan lain sebagainya.

4. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dibutuhkan.

5. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam suatu sistem pengukuran kinerja. Adanya ketidakserasian antara *outcome* dari suatu pelayanan dengan kepuasan masyarakat menunjukkan masih adanya kesenjangan harapan pada masyarakat.

Menurut Dwiyanto (dalam Masana Sembiring, 2012: 98-99) mengemukakan beberapa indikator dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur pada tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Dalam hal ini ukuran untuk mengukur produktivitas yaitu dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memberikan hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Kepuasan masyarakat dijadikan sebagai informasi yang mudah didapat melalui media publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah, dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Menurut Lenvine (dalam Masana Sembiring, 2012:99) menyatakan bahwa responsibilitas menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi konsisten dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan Mahsun (dalam Masana Sembiring, 2012:101-104) mengemukakan bahwa dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi antara lain:

1. Masukan (*Input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dari

program atau kegiatan tersebut. Hal yang dapat dikategorikan sebagai masukan antara lain waktu, sumber daya manusia, bahan, material, kebijakan, peralatan, dan lain-lain yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

2. Proses (*Process*)

Pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh semua sumber daya yang dimiliki diproses melalui manajemen organisasi yaitu berfungsinya perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang mana masukan-masukan tersebut akan diolah menjadi barang atau jasa sebagai kinerja untuk publik.

3. Keluaran (*Output*)

Keluaran menunjukkan hasil kerja apakah berupa barang atau jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. Dalam menilai keluaran (*output*) dapat diketahui apakah kegiatan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau belum.

4. Hasil (*Outcome*)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran indikator hasil seringkali rancau dengan indikator keluaran. Perbedaannya adalah meskipun produk/jasa yang dihasilkan oleh organisasi telah berhasil dicapai dengan baik, namun belum tentu hasil yang diharapkan dengan adanya produk/jasa tersebut dapat tercapai.

5. Manfaat (*Benefits*)

Manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat ini menggambarkan suatu manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat dari suatu kegiatan baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang dimana hasil tersebut dipergunakan secara tepat waktu dan berfungsi penuh.

6. Dampak (*Impact*)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Indikator dampak ini menggambarkan pengaruh yang diperoleh dari indikator manfaat.

Menurut Masana Sembiring (2012: 111-114) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain:

1. Beban tugas

Beban tugas tidak setiap hari ada disuatu unit organisasi sehingga mengakibatkan pegawai menganggur. Pegawai yang menganggur akan mengganggu pelaksanaan tugas pegawai lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian kinerja organisasi. Dalam mewujudkan keseimbangan beban tugas dengan tenaga kerja atau pegawai, dapat ditempuh dengan pemindahan pegawai dari organisasi/unit organisasi yang berlebih pegawainya serta dibutuhkan nilai-nilai bersama yang kuat, terutama untuk pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Paradigma bekerja

Paradigma bekerja melihat pada pandangan pegawai organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Tentang bagaimana pandangan pegawai dalam bekerja ini akan mempengaruhi baik-buruknya kinerja pegawai. Paradigma bekerja yang dimiliki oleh pegawai akan berdampak pada sikap pegawai dan usaha pegawai dalam menjalankan tugasnya.

3. Unsur 3P (Personalia, Pembiayaan, dan Prasarana dan Sarana)

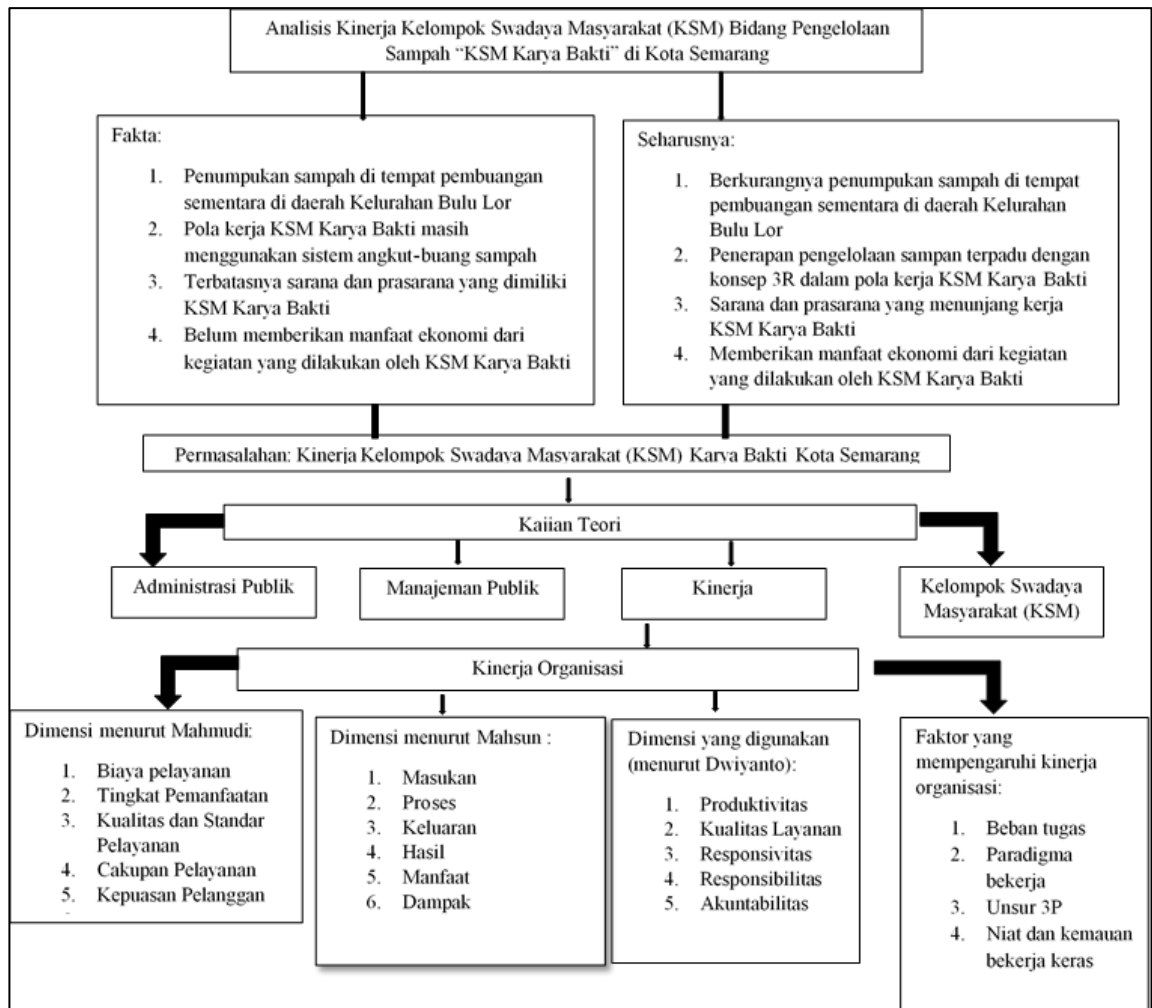
Keterbatasan unsur 3P (Personalia, Pembiayaan, dan Prasarana dan Sarana) juga turut berpengaruh pada pencapaian kinerja organisasi. Jumlah dan kualitas pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menurunkan kinerja organisasi. Tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan, tetapi tidak diikuti dengan pemberian anggaran atau pembiayaan yang cukup akan mempengaruhi kinerja organisasi ke depannya. Prasarana dan sarana seperti alat-alat kerja turut berdampak dalam pelayanan masyarakat serta mempengaruhi kinerja organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat.

4. Niat dan kemauan bekerja keras

Niat dan kemauan bekerja keras pegawai merupakan faktor penting dalam mewujudkan kinerja organisasi. Pegawai yang tidak memiliki niat atau kemauan serta komitmen bekerja keras, maka kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan terimplementasikan dengan baik dan masyarakat tidak terlayani berdasarkan aspirasi dan tuntutan mereka.

Berdasarkan dimensi kinerja organisasi oleh para ahli, penulis menggunakan dimensi kinerja milik Dwiyanto karena indikator sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kinerja organisasi. Disamping itu, dimensi-dimensi yang terdapat pada konsep kinerja organisasi milik Dwiyanto sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti mengenai produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas dari kegiatan yang dilakukan dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti, sehingga penulis menjadi lebih mengetahui bagaimana kinerja dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja organisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah faktor kinerja organisasi milik Masana Sembiring, karena melihat pada faktor-faktor yang disebutkan tersebut merupakan hal dapat diteliti pada kinerja KSM Karya Bakti.

1.6.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 OPERASIONALISASI KONSEP

Kinerja dalam kegiatan di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti adalah suatu proses pencapaian tujuan KSM Karya Bakti melalui sistem kerja dalam pengelolaan sampah. Analisis kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bidang Pengelolaan Sampah “KSM Karya Bakti” di Kota Semarang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Produktivitas yaitu seberapa besar hasil akhir yang diperoleh KSM Karya Bakti secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat dilihat dari:
 - a. Adanya produksi barang/jasa sebagai bagian dari bentuk pengelolaan sampah.
 - b. Kondisi kebersihan lingkungan Kelurahan Bulu Lor
 - c. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara maksimal.
2. Kualitas Layanan yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh KSM Karya Bakti dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari timbunan sampah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat dan bersih. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari:
 - a. Pekerjaan pengelolaan sampah dengan cepat dan tepat.
 - b. Interaksi yang terjalin antara anggota KSM Karya Bakti dengan masyarakat setempat.
 - c. Baik-tidaknya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki.

3. Responsivitas yaitu suatu kepekaan KSM Karya Bakti dalam memberikan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat mengenai persampahan di lingkungan masyarakat dengan tepat. Responsivitas dapat dilihat dari:
 - a. Tujuan dibentuknya KSM Karya Bakti.
 - b. Adanya pengaduan oleh masyarakat terhadap KSM Karya Bakti.
 - c. Respon anggota KSM Karya Bakti dalam menangani keluhan terkait pelayanan yang diberikan mengenai kebersihan dan persampahan.
 - d. Upaya KSM Karya Bakti untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas yaitu suatu kewajiban sebagai anggota KSM Karya Bakti untuk melaksanakan serta menyelesaikan tugasnya terutama mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor. Responsibilitas dapat dilihat dari:
 - a. Pelaksanaan tugas sesuai dengan *job desk* masing-masing anggota KSM Karya Bakti.
 - b. Tidak adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan antar anggota KSM Karya Bakti.
 - c. Menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
5. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban KSM Karya Bakti kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan mengenai pengelolaan sampah. Akuntabilitas dapat dilihat dari:
 - a. Kepatuhan terhadap prosedur pengerjaan tugas yang telah ditentukan.

- b. Adanya pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSM Karya Bakti baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Perbaikan pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab atas keluhan masyarakat.

1.7.1 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain:

1. Beban tugas yakni tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota KSM Karya Bakti dalam mencapai tujuan apakah telah terjadi keseimbangan tugas dengan personil yang dimiliki organisasi. Faktor ini dapat dilihat dari:
 - a. Jumlah kegiatan maupun program yang dimiliki oleh KSM Karya Bakti dalam pengelolaan sampah.
 - b. Personil yang dimiliki oleh KSM Karya Bakti untuk menjalankan tugasnya dalam pengelolaan sampah.
 - c. Pembagian beban tugas kepada anggota KSM Karya Bakti.
2. Paradigma bekerja yakni pandangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya dalam organisasi serta dapat mempengaruhi sikap dan usaha anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Faktor ini dapat dilihat dari:
 - a. Sistem kerja yang diterapkan dalam KSM Karya Bakti.
3. Unsur 3P (Personalia, Pembiayaan, dan Prasarana dan Sarana) yakni ketersediaan sumber daya yang dimiliki dalam menunjang kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh anggota KSM Karya Bakti seperti personil,

alat kerja, ruangan/gedung, dan anggaran yang dimiliki. Faktor ini dapat dilihat dari:

- a. Jumlah anggota yang dimiliki oleh KSM Karya Bakti.
 - b. Alat-alat kerja yang dimiliki oleh KSM Karya Bakti.
 - c. Ruangan atau tempat yang digunakan sebagai wadah berkumpul, rapat, pertemuan, atau diskusi.
 - d. Anggaran yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah.
4. Niat dan kemauan bekerja keras yakni sikap mendasar yang perlu dimiliki oleh anggota KSM Karya Bakti dalam menjalankan pekerjaannya dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Faktor ini dapat dilihat dari:
- a. Motivasi yang digunakan oleh para anggota KSM Karya Bakti dalam menjalankan pekerjaannya.

1.8 METODOLOGI PENELITIAN

1.8.1 Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2014), penelitian deskriptif yakni mempelajari permasalahan dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi tertentu termasuk tentang kegiatan, hubungan, sikap, proses, serta pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti dapat

membandingkan fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Menurut Sugiyono (2015) metodologi kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada *post positivism* yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus memiliki bekal wawasan dan teori yang luas agar mampu menganalisis kondisi sosial yang diteliti menjadi lebih bermakna dan jelas. Analisis data yang digunakan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian diolah menjadi teori atau hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan data yang memiliki makna. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisis kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bidang pengelolaan sampah “KSM Karya Bakti” di Kota Semarang

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah wilayah Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang di Jl. Surtikanti Raya 27B, Bulu Lor, Semarang Jawa Tengah dipilih sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang sebagai badan pemerintahan yang membentuk dan membawahi KSM Karya Bakti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dapat diminta keterangan atau pernyataan tentang suatu pendapat atau fakta. Subjek penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Para ahli menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah hal yang ditunjuk untuk diteliti oleh peneliti atau disebut juga informan. Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Teknik dalam menentukan informan peneliti harus memilih orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan tema penelitian yaitu Analisis kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bidang Pengelolaan Sampah “KSM Karya Bakti” di Kota Semarang, subjek dalam penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti. Berikut adalah pihak yang dapat dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian:

1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Bulu Lor
2. Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti
3. Masyarakat Kelurahan Bulu Lor

Teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2015), *purposive* adalah teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dapat dianggap paling tahu tentang suatu yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Sehingga subjek pada penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti sebagai salah satu kelompok masyarakat yang menangani permasalahan sampah di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Bulu Lor.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif yang berbentuk data kuantitatif yang berbentuk angka dan kalimat atau kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang berbentuk pernyataan bukan dalam bentuk angka, kalimat atau kata-kata. Penelitian ini menggunakan data berupa: teks, simbol-simbol dan kata-kata tertulis yang menggambarkan atau merepresentasikan peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan dalam suatu fenomena.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah pernyataan/keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data menggambarkan tentang darimana suatu keterangan dalam penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data sekunder yakni data yang diperoleh

penulis bersumber pada data yang sudah ada melalui artikel maupun jurnal.

Berikut narasumber sebagai sumber data primer:

1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bulu Lor. Dipilih sebagai narasumber karena lembaga LMPK menjadi lembaga penasihat untuk beberapa KSM di Kelurahan Bulu Lor.
 2. Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti. Dipilih sebagai narasumber karena sebagai orang yang berada dilapangan dalam proses pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Lor.
 3. Masyarakat Kelurahan Bulu Lor. Dipilih sebagai narasumber karena sebagai pihak yang merasakan hasil kinerja dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bakti.
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti dari buku, dokumen, jurnal, laporan, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai informasi atau teori yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, artinya data sekunder berperan sebagai data pendukung data primer.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada kondisi saat ini pengumpulan data dilaksanakan secara dapat dilaksanakan secara *online* maupun *offline* tergantung pada kemungkinan kondisi di Kelurahan Bulu Lor. Pengumpulan data secara *online* dapat

dilakukan apabila tersedianya data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui situs *online*. Pengumpulan data secara *offline* dapat diberlakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

1. Observasi

Teknik observasi menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015:228) adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan peneliti dalam suatu lingkungan dan untuk menemukan hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. (Pedoman observasi dapat dilihat pada Lampiran 1.1)

2. Wawancara

Metode wawancara menurut Sugiyono (2015: 231) mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Pedoman wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1.2)

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2015: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Bentuk lain dari dokumen misalnya seperti gambar, film, foto, sketsa dan lain sebagainya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2015: 244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, lapangan dan catatan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisis, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Secara sederhana analisis data merupakan proses pengolahan data ke suatu bentuk yang lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2015: 247), mereduksi data merupakan suatu proses dalam merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan lebih mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya serta mencari data lain bila diperlukan. Data-data yang telah direduksi ini memberikan gambaran mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti dalam meneliti masalah.

b. Penyajian data

Menurut Sugiyono (2015: 249) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, hubungan antar kategori, bagan, uraian dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:

249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015: 252) penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, teori atau hipotesis. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah ataupun tidak karena dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan memungkinkan adanya perkembangan setelah penelitian berada di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Pada setiap penelitian yang dilakukan, data yang didapatkan harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau kebenaran. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2015: 241) tujuan dari triangulasi adalah untuk mencari kebenaran tentang fenomena yang ada, namun lebih kepada pemahaman dari peneliti dari yang telah ditemukannya. Disamping pencarian kebenaran atas suatu temuan baru, melalui uji triangulasi peneliti juga dapat memahami dunia sekitar, mungkin yang disampaikan oleh informan salah, dan lain sebagainya.